

Penguatan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan melalui UMKM dan Koperasi dalam Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus: Petani Madu Hutan di Taman Nasional Ujung Kulon)

Hijrah Nasir*

hijrahnasir2013@gmail.com/hnasir@wwf.id

Abstract

The poverty in rural areas still remains the big problems for Indonesia nowadays. One of program can be encouraged in rural areas is the empowerment of local community in many sectors. Hence, this research aims to analyze the community empowerment in sustainable rural economic development by providing the case study honey bee farmer called Kelompok Tani Madu Hutan Ujung Kulon (KTMHUK) in Ujung Kulon National Park. The importance of this research due to the concept offered by this group can be implemented as role model in strengthening the economic development in Ujung Kulon National Park by keep undertaking the conservation activities and sustainability concept by reinforcing the village institution in group level through cooperation (economic enterprise) and creating the small and medium enterprises organized by rural community. This research is a qualitative research using the literatures to analyze the specific case. Furthermore, in analyzing this case, the author specifically uses the theory of sustainable economic development from Michael Porter and Claas van der Linde who explain that there are win-win opportunities in economic and environment by the improvement to reduce the environment harassment in production process. The result shows that the community empowerment in rural areas, particularly for KTMHUK group in UKNP can become the successful business by cooperating with some stakeholders consist of local farmer, government, UKNP officers, companies, and NGO.

Keywords: *Cooperation, Economic Development, Rural Community, Sustainability, Ujung Kulon National Park*

Abstrak

Kemiskinan di wilayah pedesaan masih menyisakan banyak masalah untuk Indonesia hari ini. Salah satu upaya yang bisa didorong adalah penguatan masyarakat desa dalam berbagai sektor. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan masyarakat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui studi kasus petani madu hutan yakni Kelompok Tani Madu Hutan Ujung Kulon (KTMHUK) di Taman Nasional Ujung Kulon. Pentingnya penelitian ini didasarkan pada konsep yang ditawarkan oleh kelompok ini yang bisa diimplementasikan sebagai model dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Ujung Kulon dengan tetap mengedepankan upaya konservasi dan keberlanjutan melalui penguatan lembaga desa melalui koperasi dan mendirikan UMKM yang diorganisir oleh masyarakat lokal. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menganalisis berbagai literatur terkait dengan isu yang dibahas. Dengan demikian, dalam menganalisis kasus ini, penulis secara spesifik menggunakan teori pembangunan ekonomi berkelanjutan dari Michael Porter dan Claas van der Linde yang menjelaskan bahwa ada win-win opportunities dalam ekonomi dan lingkungan melalui upaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan dalam proses produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan masyarakat di pedesaan, khususnya oleh kelompok

* Korespondensi: Communication and Education Officer WWF Indonesia Southern Sumatra Program, Provinsi Lampung, Jln. Jend. Urip Sumoharjo, Sukarame 35135, Bandar Lampung – Lampung. Hp.+628232 8013 171. Email: hijrahnasir2013@gmail.com/hnasir@wwf.id

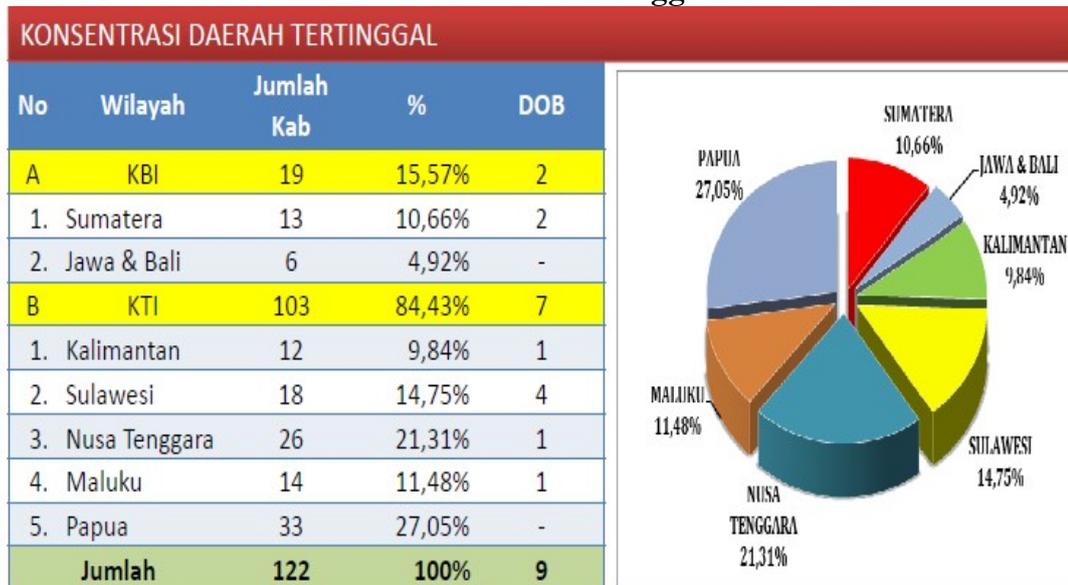
KTMHUK di TNUK mampu menjadi usaha yang sukses melalui kerjasama berbagai stakeholder, seperti petani, pemerintah, BTNUK, perusahaan, dan NGO.

Kata Kunci: Keberlanjutan, Masyarakat Desa, Pembangunan Ekonomi, Taman Nasional Ujung Kulon

Pendahuluan

Salah satu masalah yang hingga saat ini masih dihadapi oleh Indonesia adalah kemiskinan di pedesaan. Data dari BPS (2015) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di daerah pedesaan di Indonesia naik sebesar 0,57 juta dari 17,37 juta jiwa pada September 2014 menjadi 17,94 juta jiwa pada Maret 2015. Masyarakat miskin banyak tersebar di daerah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Daerah tertinggal terbanyak di pulau Papua, disusul Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Sumatera dan Kalimantan. Di Pulau Jawa dan Bali hanya ada 6 Kabupaten Tertinggal di 2 Provinsi, yakni: di Banten (Lebak dan Pandeglang), dan di Jawa Timur (Bangkalan, Situbondo, Bondowoso dan Sampang). Tabel berikut ini menunjukkan konsentrasi daerah tertinggal di pulau-pulau yang tersebar di Indonesia.

Tabel 1. Konsentrasi Daerah Tertinggal di Indonesia



Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015

Dari tabel di atas tampak bahwa ketimpangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia berdampak pada persebaran daerah tertinggal yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia yaitu sebanyak 103 kabupaten,

dimana Papua menjadi region dengan jumlah kabupaten tertinggal terbanyak di Indonesia (27,05%) atau berjumlah 33 kabupaten, disusul oleh Nusa Tenggara (21,3%) sebanyak 26 kabupaten. Sementara Kawasan Barat Indonesia hanya ada 19 kabupaten dimana di Sumatera berjumlah 13 kabupaten, dan Jawa menjadi pulau dengan jumlah kabupaten tertinggal terendah di Indonesia dengan 6 kabupaten tertinggal dimana 2 diantaranya berada di Banten yakni Pandeglang dan Lebak serta Provinsi Jawa Timur yakni Bangkalan, Situbondo, Bondowoso, dan Sampang. Dengan data di atas tampak bahwa pengembangan perdesaan (*rural-based development*) sangat diperlukan untuk mengintervensi desa tertinggal, agar bisa lebih cepat mengentaskan ketertinggalan suatu daerah (Suprayoga Hadi, 2015).

Kawasan tertinggal didefinisikan sebagai suatu kawasan yang tidak mampu memelihara dirinya sendiri sesuai dengan standar taraf hidup, disebabkan kemiskinan secara struktural dan natural, Kemiskinan struktural adalah kemiskinan karena struktur sosial sedangkan kemiskinan natural karena faktor alam yang tidak seimbang antara rasio jumlah penduduk dengan daya dukung alam. Dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal disebutkan bahwa daerah tertinggal adalah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional dengan criteria, antara lain: 1) perekonomian masyarakat; 2) sumber daya manusia; 3) sarana dan prasarana; 4) kemampuan keuangan daerah; 5) aksesibilitas; dan 6) karakteristik daerah.

Dalam Laporan Pemerintah Provinsi Banten, Bab V tentang Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Banten dijelaskan bahwa penanganan daerah tertinggal di Provinsi Banten fokus pada wilayah pembangunan bagian selatan yang mencakup Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Kedua kabupaten tersebut identik dengan ketertinggalan, penyebab utama ketertinggalannya dipengaruhi oleh kondisi geografis serta infrastruktur yang kurang memadai. Berdasarkan Keputusan Kementerian Daerah Tertinggal kedua Kabupaten tersebut menjadi agenda nasional dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal yang sebarannya sebagaimana terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Sebaran Desa Tertinggal di Kabupaten Pandeglang

Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Kecamatan	Jumlah Desa
1. Sumur	6	11. Labuan	6	21. Cadasari	9
2. Cimanggu	12	12. Menes	11	22. Cisata	12
3. Cibaliung	8	13. Saketi	10	23. Patia	9
4. Cikeusik	10	14. Cipeucang	6	24. Cikedal	5
5. Cigeulis	8	15. Jiput	10	25. Cibitung	10
6. Panimbang	5	16. Mandalawangi	11	26. Carita	6
7. Angsana	9	17. Cimanuk	5	27. Sukaresmi	10
8. Munjul	4	18. Kaduhejo	6	28. Mekarjaya	7
9. Bojong	6	19. Banjar	2	29. Sindangresmi	8
10. Picung	6	20. Pandeglang	7	30. Karangtanjung	10

Sumber: RAD-PPDT Provinsi Banten Tahun 2008

Dari daftar kecamatan tertinggal di atas, tampak bahwa kecamatan Sumur masuk dalam salah satu kecamatan tertinggal. Kecamatan Sumur terdiri dari 7 desa antara lain Desa Ujungjaya, Cigorondong, Kertajaya, Kertamukti, Sumberjaya, Tamanjaya, dan Tunggajaya, dimana 6 di antaranya dikategorikan sebagai desa tertinggal. Dalam tulisannya yang berjudul “Pemanfaatan Kawasan Konservasi untuk Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat”, Kepala Balai TNUK, Mamat Rahmat menjelaskan bahwa ada beberapa kondisi daerah itu disebut sebagai desa tertinggal yakni: 1) Lokasi terpencil, 2) infrastruktur (khususnya jalan) yang buruk atau rusak, 3) sebagian masyarakat sulit mendapatkan kebutuhan dasar terutama air, 4) sumber kehidupan masyarakat sangat tergantung pada potensi hutan, 5) lapangan kerja yang sangat terbatas, dan 6) pembangunan perekonomian yang lambat.

Penduduk kecamatan Sumur sebagian besar bekerja dalam sektor pertanian dan sektor kelautan karena wilayah mereka yang terdiri dari daratan rendah untuk areal pertanian dan perkebunan serta potensi laut yang besar. Namun karena lahan pertanian hanya bisa diolah ketika musim hujan, sehingga ini berdampak pada produktivitas pertanian masyarakat yang rendah dan kualitas hidup masyarakat yang rendah pula. Padahal dalam visi dan misi RPJMN 2015-2019 untuk mendorong

kemajuan di desa tertinggal, pemerintah telah mencanangkan program untuk meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata serta memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya.

Namun harus disadari bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah masih bersifat parsial dan tidak maksimal. Hal itu tampak dari belum adanya usaha nyata dari pemerintah dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan koperasi hasil pertanian masyarakat. Selain itu keberadaan Taman Nasional Ujung Kulon yang berbatasan langsung dengan desa-desa di Kecamatan Sumur menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, keberadaan kelompok petani madu yang diberdayakan oleh kelompok Hanjuang menjadi menarik untuk diteliti. Pertama, karena madu diambil di dalam hutan melalui proses panen secara lestari. Lestari di sini berarti dilakukan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang ada di dalam hutan dengan menganut prinsip *sustainability*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan pembangunan ekonomi berkesinambungan melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui koperasi dan UMKM untuk menghasilkan produk yang berkelanjutan melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder serta menelusuri tantangan dan hambatan yang dihadapi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing kelompok. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui UMKM dan koperasi, khususnya di wilayah yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak yang akan merancang model pengembangan UMKM dan koperasi yang serupa.

Tinjauan Pustaka

Ada beberapa literatur yang membahas mengenai kegiatan pembangunan ekonomi berkelanjutan di pedesaan dengan pembentukan UMKM dan koperasi. Salah satu penelitian terkait UMKM dengan pengelolaan berkelanjutan adalah Bank Indonesia yang melakukan kajian dengan pendekatan kualitatif, yaitu melalui *focus group discussion* (FGD) dan pendekatan kuantitatif, yaitu melalui *survei* yang melibatkan 288 UMKM dari 4 sektor ekonomi (Pertanian, Industri Pengolahan, Pertambangan dan

Transportasi), termasuk *stakeholder* terkait (Instansi/Dinas dan Lembaga Perbankan) baik di tingkat pusat maupun di daerah, yang tersebar di wilayah DKI Jakarta (Jabodetabek), Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur.

Dari hasil laporan akhir BI bertajuk “Laporan Akhir Kesiapan UMKM Ramah Lingkungan dalam Mendapatkan Akses Pembiayaan” yang diterbitkan tahun 2012 menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM yang ada saat ini masih belum menjadikan kriteria ramah lingkungan sebagai hal yang perlu memperoleh perhatian khusus. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: (a) minimnya pengetahuan akan kelestarian lingkungan, (b) lemahnya aspek manajemen, (c) aspek teknis yang tidak menunjang, serta (d) belum tersedianya sumber pembiayaan yang berorientasi pada ramah lingkungan. Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk ramah lingkungan masih belum tumbuh. Selain itu, ditemukan bahwa sebagian besar perbankan masih belum memiliki skim khusus yang ditujukan untuk mendorong pembiayaan UMKM agar ramah lingkungan, meskipun program inisiasi pembiayaan ramah lingkungan telah diprakarsai oleh lembaga atau negara donor yang bekerjasama dengan KLH, namun program tersebut masih belum menarik minat pihak perbankan untuk melanjutkannya. Bank Indonesia merekomendasikan perlunya upaya untuk penyediaan sumber pembiayaan yang diorientasikan secara khusus untuk menunjang usaha ramah lingkungan. Strategi pembiayaan yang mungkin dipilih adalah mengalokasikan dana CSR guna pembinaan UMK yang belum *bankable* dan belum *feasible*, menyediakan skim kredit khusus bagi UMK yang belum *feasible* namun sudah *bankable*, serta menyediakan berbagai program insentif bagi UMKM yang telah memulai atau berhasil menjadi ramah lingkungan.

Selanjutnya dijelaskan dalam paper yang ditulis oleh Prihatin Lumbanraja dengan judul “Bersama UKM Membangun Ekonomi Rakyat dan Lingkungan Hidup” bahwa dalam aturan perundang-undangan tidak ada kewajiban untuk usaha kecil-mikro untuk membuat dokumen pengelolaan lingkungan terkait usaha mereka, namun adanya pengelolaan usaha yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan berdampak kumulatif yang dapat menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan hidup. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat internasional dan regulasi perdagangan internasional tentang pentingnya membeli produk yang ramah

lingkungan semakin mendorong UMKM untuk bisa memiliki keunggulan kompetitif dengan melakukan usaha yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Syafril Kemala pada tahun 2004 tentang peranan kelembagaan koperasi unit desa (KUD) dalam tataniaga cengkeh di Sulawesi Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari peran kelembagaan KUD serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak dapat berperannya KUD dalam tataniaga cengkeh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tabulasi untuk melihat peran/aktivitas KUD dalam tataniaga cengkeh. Sedangkan untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi peran KUD tersebut dilakukan analisis statistik dengan menggunakan model *Linear Probability Model*. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa peran KUD dalam tataniaga cengkeh di Sulawesi Tengah sangat kecil yaitu sebesar 11,1 % petani yang menjual langsung ke KUD, serta tidak ada satupun petani yang menjual seluruh hasilnya ke KUD. Faktor-faktor yang mempengaruhi petani tidak bersedia menjual hasil pertaniannya ke KUD dikarenakan KUD membeli hasil pertanian dengan harga yang rendah, cara pembayaran tidak tunai, serta volume penjualan cengkeh petani kecil. Bila KUD dapat meningkatkan harga Rp 100/kg, maka KUD mempunyai peluang meningkatkan pembelian 4 %, serta dengan cara pembayaran tunai, maka KUD mempunyai peluang 68,87 % untuk dapat menyerap pembelian cengkeh.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dianalisis secara deksriptif analitik yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang ada mengenai objek yang diteliti yang dihimpun dari tulisan Kelompok Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara, data dari Balai Taman Nasional Ujung Kulon, dan literatur mengenai teori serta sumber-sumber terkait yang relevan dengan objek yang diteliti. Tulisan ini dimulai dengan latar belakang yang menjelaskan tentang keberadaan wilayah yang diteliti sebagai desa tertinggal dan sekilas gambaran tentang objek yang akan diteliti. Selanjutnya dijelaskan mengenai tujuan dan manfaat penelitian, me-review tulisan-tulisan terdahulu yang relevan dengan studi yang diteliti, serta pembahasan dan hasil penelitian yang dianalisis berdasarkan teori pembangunan ekonomi berkelanjutan

dari Michael Porter dan Claas van der Linde serta konsep mengenai UMKM dan koperasi di pedesaan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, khususnya di desa-desa Kecamatan Sumur yang berbatasan dengan Taman Nasional Ujung Kulon diinisiasi oleh Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara (selanjutnya disingkat PHMN) pada tahun 2009 dengan melakukan usaha pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dimana salah satu produknya adalah madu hutan. Di tahun yang sama, mereka menginisiasi terbentuknya Kelompok Tani Madu Hutan Ujung Kulon (KTMHUK). Organisasi ini sendiri berdiri pada tahun 2008 yang fokus pada isu keanekaragaman hayati, pertanian organik, advokasi dan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ekologi yang berkelanjutan. Di tahun 2012, kelompok ini kemudian membentuk koperasi yang diberi nama Koperasi Hanjuang yang telah terdaftar pada Dinas Koperasi Kabupaten Pandeglang dengan badan hukum No: 33/BH/XI.6/DK.UMKM/I/2012 pada 31 Januari 2012, dimana fungsi dari koperasi ini, antara lain: a.) Memasarkan produk-produk yang di hasilkan oleh kelompok-kelompok dampingan Perhimpunan Hanjuang, b.) Membangun skema mata rantai perdagangan yang menghormati prinsip-prinsip perdagangan adil (*fair trade*), c.) Mencari sumber-sumber permodalan untuk meningkatkan usaha perdagangan madu anggota koperasi, dan d.) Meningkatkan kapasitas anggota dan menciptakan inovasi-inovasi produk turunan berbahan dasar madu.

Tabel 3. Desa Sebaran Kelompok Tani Madu Hutan Ujung Kulon (KTMHUK)

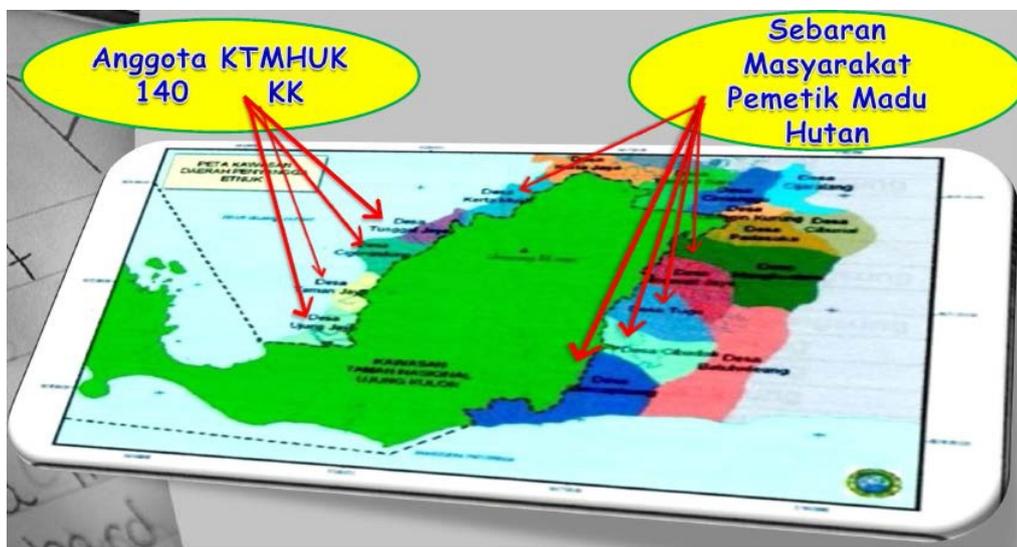
No.	Wilayah	Jumlah Anggota
1.	Kampung Cikawang Girang, Desa Ujung Jaya	56 orang
2.	Kampung Cimenteng, Desa Tamanjaya	29 orang
3.	Kampung Jaringao, Desa Tunggaljaya	37 orang
4.	Kampung Gunung pariuk, Desa Cigorondong	18 orang
	Total	140 orang

Sumber: Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara (2016)

Tabel 3. menunjukkan bahwa kegiatan Kelompok Tani Madu Hutan Ujung Kulon (KTMHUK) dikembangkan di 4 desa sejak tahun 2009, yakni Ujung Jaya,

Tamanjaya, Cigorondong, dan Tunggaljaya dimana yang paling banyak berada di Kampung Cikawung girang, Desa Ujung Jaya dengan jumlah anggota 56 orang/KK yang disusul oleh Kampung Jaringao, Desa Tunggaljaya yang berjumlah 37 orang lalu Kampung Cimenteng, Desa Tamanjaya sebanyak 29 orang/KK serta Kampung Gunung Pariuk, Desa Cigorondong sebanyak 18 orang/KK. Sehingga total anggota sebanyak 140 orang. Gambar di bawah ini juga menunjukkan desa sebaran anggota dan wilayah dimana mereka melakukan panen madu hutan. Kelompok tani madu hutan Ujung Kulon melakukan panen madu hutan di dalam kawasan Taman Nasional yakni di dalam zona tradisional sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 2.

Gambar 1. Gambar Persebaran Anggota Kelompok KTMHUK dan wilayah



Sumber: Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara (2016)

Gambar 2 menunjukkan pembagian zonasi dari Taman Nasional Ujung Kulon dimana zona tradisional digambarkan dengan warna coklat. Zona Tradisional merupakan bagian Taman Nasional yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahan masyarakatnya yang mempunyai ketergantungan dengan sumberdaya alam. Zona tradisional memiliki luas +2.553 Ha yang terdiri dari daratan seluas +2.356 Ha dan lautan seluas +197 Ha.

dalam proses pemanenan madu hutan yang dilakukan di dalam kawasan TNUK. Nurul Wardanhi dalam tulisannya yang berjudul “Konservasi Hutan dan Variasi Habitat” menjelaskan bahwa upaya ini sejalan dengan pembangunan hutan berkelanjutan, dimana dijelaskan bahwa dalam pembangunan hutan berkelanjutan terdapat tiga komponen dasar yang perlu diperhatikan, antara lain: 1) tidak adanya eksploitasi yang berlebihan, 2) terdapat kawasan yang jelas, 3) penanaman kembali/replanting SDGTH untuk kepentingan kayu dan non-kayu (Awang, 2006).

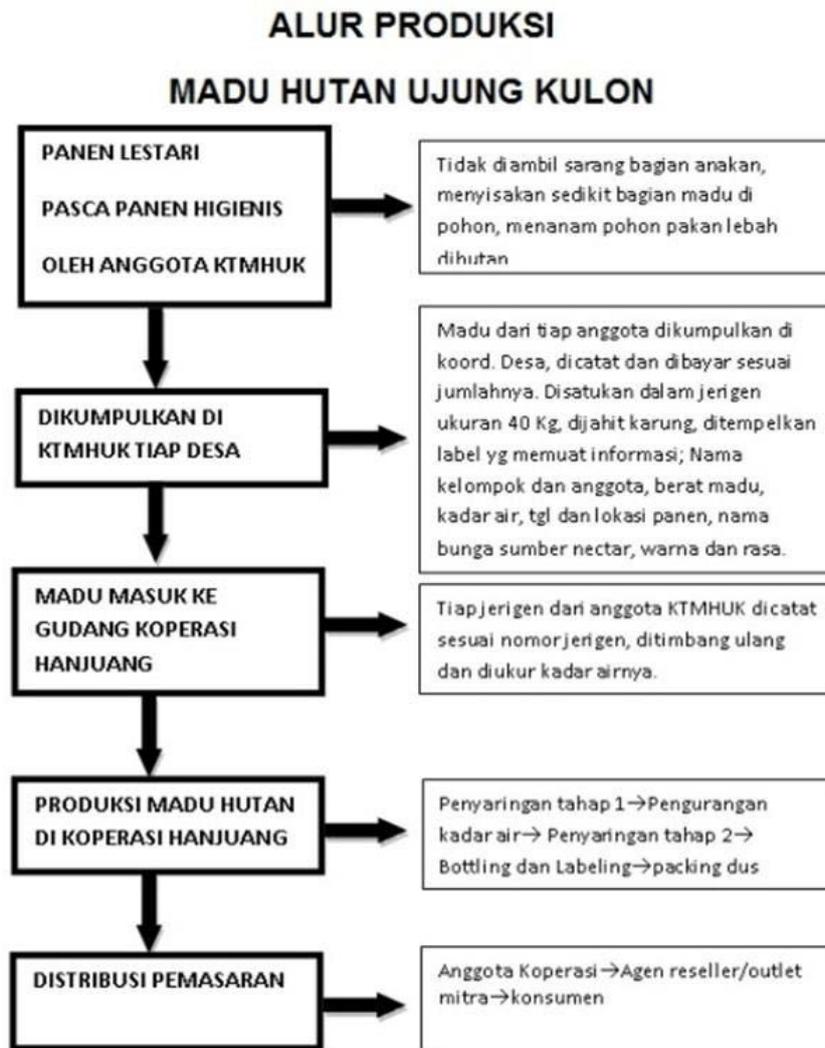
Sebagai salah satu UMKM, KTMHUK memiliki potensi untuk bisa bersaing karena memiliki keunggulan kompetitif yakni ramah lingkungan. Sebagaimana dijelaskan oleh Prihatin Lumbanraja dalam penelitiannya yang berjudul “Bersama UKM Membangun Ekonomi Rakyat dan Lingkungan Hidup” dijelaskan bahwa dengan meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap produk yang ramah lingkungan diperlukan adanya percepatan peningkatan kapasitas UMKM untuk memiliki keuntungan kompetitif yang memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga UMKM dapat bertahan untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan anggotanya (Prihatin Lumbanraja, 2011: Vol. 14, No 2).

Petani madu hutan Ujung Kulon memanen madu dari lebah hutan Apis Dorsata atau dalam bahasa lokal disebut dengan *odeng* yang merupakan madu Asia yang paling produktif menghasilkan madu, membuat sarang dengan hanya satu sisiran yang menggantung di dahan pohon atau tebing bebatuan, dengan ukuran sarang 2 x 1 meter dapat menghasilkan madu 15-20 kg/sarang. Namun sayangnya, lebah hutan Apis Dorsata hingga saat ini belum dapat dibudidayakan dan populasi sangat tergantung dengan kondisi ekosistem hutan. Di Ujung Kulon, panen dilakukan pada musim kemarau antara bulan Agustus sampai November saat tanaman endemik hutan berbunga. Karena berada dalam hutan dengan ekosistem yang masih terjaga dan tidak ada tambahan apapun, madu ini dikategorikan sebagai madu organik dengan kadar air rata-rata 24-26 %. Namun dalam standar SNI, kadar air madu sebaiknya 22 % sehingga untuk menyesuaikan standar tersebut, kelompok melakukan proses pengurangan kadar air dengan cara dehumisasi agar tidak merusak kandungan enzim madu. Dimana saat ini proses pengurangan kadar air madu hutan Ujung Kulon masih dalam percobaan.

KTMHUK melakukan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dimana ada keharusan bagi anggota untuk melakukan penanaman tanaman nektar madu dan

tanaman tempat sarang lebah dan melakukan pola pemanenan madu hutan *odeng* (*Apis Dorsata*) dengan tidak mengambil anakan lebah dan menyisakan 20% bagian madu untuk stok pakan anakan madu sehingga koloni dapat bertambah.

Gambar 3. Alur Produksi Madu Hutan Ujung Kulon



Sumber: Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara (2016)

Jika dianalisis berdasarkan teori pembangunan ekonomi berkelanjutan dari Michael Porter dan Claas van der Linde yang menjelaskan bahwa ada kesempatan (opportunity) yang sifatnya saling menguntungkan dalam ekonomi dan lingkungan

melalui perbaikan dalam pengurangan dampak buruk terhadap lingkungan dalam proses produksi, sehingga dalam pengelolaan madu hutan (odeng) Ujung Kulon melakukan telah mengikuti kaidah pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Saat ini upaya yang dilakukan oleh PHMN adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas petani madu dengan peran serta Jaringan Madu Hutan Indonesia (JMHI) serta melakukan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pola panen madu hutan lestari dan memperluas jaringan pemasaran. Dengan upaya tersebut serta dukungan dari berbagai stakeholder terkait madu yang sebelumnya dibeli oleh tengkulak dengan harga 15.000 Rupiah hingga Rp. 30.000,00 per kilogram kini telah mengalami peningkatan menjadi 65.000 Rupiah per kilogram. Dengan adanya strategi produksi dan pemasaran yang lebih baik, saat ini Koperasi Hanjuang telah memiliki omset sebesar 212.000.000 Rupiah per bulan.

Peranan dari berbagai stakeholder juga memberikan keuntungan bagi Koperasi Hanjuang dan KTMHUK dalam meningkatkan kualitas produk, manajemen kelompok, dan akses pasar. Di tahun 2013, Koperasi ini mendapatkan bantuan dana dari Dompot Dhuafa dan mampu menembus pasar global melalui kontrak dengan PT. Orindo Alam Ayu (Oriflame Indonesia) dan PT. Dian Niaga Jakarta yang menjadi konsumen tetap dari madu odeng yang dihasilkan oleh KTMHUK ini. Tahun 2016, KTMNHUK melalui PHMN menandatangani MoU dengan pihak Balai TNUK untuk melakukan panen di dalam kawasan yang lebih luas lagi. Ini diharapkan akan meningkatkan produksi madu kelompok karena lahan panen mereka akan semakin luas (lihat Gambar 4.).

Gambar 4. Produk Madu Hutan Koperasi Hanjuang Ujung Kulon



Sumber: www.koperasi-hanjuang.blogspot.co.id

Namun ada beberapa hambatan dan tantangan yang masih dihadapi oleh KTMHUK ini dalam meningkatkan usahanya. Hambatan dan tantangan tersebut, antara lain: 1.) keterbatasan kapasitas sumber daya dan skill yang memadai untuk peningkatan kualitas produksi, 2.) faktor alam dengan curah hujan yang relatif tinggi dan tidak dapat diprediksi membuat petani gagal panen karena panen madu hanya dapat dilakukan pada musim kemarau sehingga produksi menjadi tidak tetap sehingga kelompok terkadang harus membeli dari tempat lain untuk memenuhi pesanan dari pasar yang cukup besar, 3.) teknologi pemanenan dan pengolahan madu yang masih terbatas, 4.) belum adanya pabrik pengolahan madu, 5.) masih terbatasnya produksi produk turunan lebah madu, 6.) belum adanya pasar lokal untuk pemasaran produk madu dan turunannya, 7.) terbatasnya akses untuk masuk ke kawasan TNUK, 8.) kurangnya bantuan dari pemerintah untuk memberikan pendampingan kepada para petani lebah, pemberian modal usaha, serta perlindungan usaha dari pemerintah, 9.) buruknya kondisi infrastruktur jalan sehingga menghambat distribusi produk

Terkait dengan keterlibatan pemerintah dalam mendorong peningkatan usaha KTMHUK di yang berlokasi di desa tertinggal, sebenarnya dalam arah kebijakan desa dalam RPJMN 2015-2019 (Perpres 2/2015) disebutkan bahwa tujuan arah kebijakan desa adalah menguatkan desa dan masyarakat serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dan perdesaan berkelanjutan, melalui: 1.) Pemenuhan SPM sesuai dengan kondisi geografis Desa, 2.) Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa, 3.) Pembangunan Sumber Daya Manusia, meningkatkan Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya masyarakat Desa, 4.) Penguatan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, 5.) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaan, dan 6.) Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

Dalam mendorong terwujudnya visi tersebut, pemerintah melakukan beberapa upaya, antara lain: melalui peningkatan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata, pemberdayaan UMKM dan Koperasi dalam bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya serta peningkatan pembangunan infrastruktur di pedesaan. Namun sayangnya beberapa hal di atas masih belum diimplementasikan di 4 desa dimana kelompok tani madu hutan berada. Kondisi jalan

yang rusak parah, dan bantuan modal bagi UMKM dan koperasi belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam pemaparannya yang berjudul “Membangun Peluang Ekonomi Alternatif Masyarakat Sekitar Hutan TNUK Melalui Pengelolaan Madu Hutan dan Produk Turunannya Secara Lestari”, Irwan Dani menjelaskan bahwa untuk menjawab tantangan dari usaha petani madu hutan Ujung Kulon, beberapa hal yang ingin dilakukan oleh kelompok, antara lain: 1.) Mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya dan kualitas produk, 2.) Melakukan penanaman masif pohon pakan lebah, 3.) Melakukan penelitian-penelitian dalam upaya melestarikan koloni lebah madu hutan, 4.) Membangun pasar lokal, misalnya membangun gerakan minum madu dalam rangka membuka pasar lokal dan menyehatkan masyarakat, 5.) Membangun pusat penelitian dan pelatihan, misalnya sekolah lapang atau museum lebah, 6.) Membangun home industri berbasis komunitas di desa terkait madu hutan dan produk turunannya, 7.) Membangun jaringan akses permodalan untuk pengembangan usaha madu.

Kesimpulan

Dari tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh kelompok tani madu hutan Ujung Kulon sebagaimana yang dijelaskan di atas, perlu adanya upaya-upaya dari berbagai pihak untuk mendorong peningkatan usaha kelompok, antara lain; 1.) Perlu adanya pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya/anggota kelompok untuk proses panen lestari dan peningkatan kapasitas manajemen koperasi dan pemasaran baik oleh pemerintah, NGO, atau pihak-pihak lain, 2.) Pemerintah menyediakan alokasi APBD kepada kelompok petani madu untuk meningkatkan kesejahteraan petani madu karena mereka secara aktif melakukan konservasi kawasan hutan, 3.) Meningkatkan kerjasama dengan Balai TNUK untuk izin pemanfaatan zona tradisional untuk mendorong peningkatan produktivitas, 4.) Adanya peningkatan proses panen dan pengolahan madu hutan secara lestari dengan teknologi yang tepat guna, 5.) Mendorong inovasi kelompok dalam menghasilkan produk turunan madu hutan, misalnya pemanfaatan limbah lilin sarang lebah menjadi lilin aromaterapi untuk *spa*, *lipbalm*, sabun madu dan shampo madu serta bahan malam untuk pembuatan batik, 6.) Mendorong adanya pasar lokal untuk madu dan produk turunannya, 7.) Mendorong

peningkatan daya saing produk *odeng* masyarakat untuk berkompetisi dalam pasar Kawasan Ekonomi Khusus Pandeglang

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara atas data dan informasinya yang menjadi sumber utama dari penyusunan paper ini, Kelompok Tani Madu Hutan Ujung Kulon dan Koperasi Hanjuang serta segenap staff WWF Indonesia dan Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jaringan Madu Hutan Indonesia (JHMI) dan segenap pihak yang menjadi sumber data sekunder dari literatur terkait dan seluruh petani madu di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Bank Indonesia. (2012). "Laporan Akhir Kajian Kesiapan UMKM Ramah Lingkungan dalam Mendapatkan Akses Pembiayaan". Jakarta
- Dani, Irwan. (2016). "Membangun Peluang Ekonomi Alternatif Masyarakat Sekitar Hutan TNUK Melalui Pengelolaan Madu Hutan dan Produk Turunannya Secara Lestari". Pandeglang-Jawa Barat.
- Pemerintah Provinsi Banten. (2014). Bab V Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Banten.
- Rahmat, Mamat. (2016). "Pemanfaatan Kawasan Konservasi untuk Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat". Pandeglang-Jawa Barat.
- Sulaeman, Eman. (2013). "Madu Hutan dan Gerakan Konservasi Inisiatif Rakyat Ujung Kulon". Padenglang-Jawa Barat.
- Suprayoga Hadi. (2015). "Program Pengembangan Desa dan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019: Target dan Lokasi Prioritas", Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, RAKORNAS Kementerian KOMINFO. Jakarta.

Jurnal

Prihatin Lumbanraja. (2011). “Bersama UKM Membangun Ekonomi Rakyat”, Jurnal Ekonom, Vol 14, No 2. Medan.

Prosiding

JHMI. (2008). “Prociding Workshop Nasional Madu Hutan dan konservasi Hutan”. Jakarta.

Website

Badan Pusat Statistik. (2015). (www.bps.go.id/brs/view/1158/). Diakses pada tanggal 15 Oktober 2016.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2016). (www.setkab.go.id). Diakses pada tanggal 15 Oktober 2016.

Ujung Kulon. (2016). (www.ujungkulon.org). Diakses pada tanggal 15 Oktober 2016.

Wardanhi, Nurul. (2016). *Konservasi Hutan dan Variasi Habitat*. Koperasi Hanjuang. 2016. (www.koperasi-hanjuang.blogspot.co.id). Diakses pada tanggal 17 Oktober 2016.